

**POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA
(KABUPATEN SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

Oleh:

ADINDA GITA LESTARI
NPM : 1503110232

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **ADINDA GITA LESTARI**
N.P.M : 1503110232
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA**

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing



ELVITA YENNI, S.S., M. Hum

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NURHASANAH NASUTION, S. Sos, M.I.Kom

Dekan,



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh :

Nama : **ADINDA GITA LESTARI**
N P M : 1503110232
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Waktu : Pukul 07.45 s.d. selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dra. Hj. ASMAWITA, AM, MA**

PENGUJI II : **CORRY NOVRICA SINAGA, S.Sos., M.A**

PENGUJI III : **ELVITA YENNI, S.Sos., M.Hum**

PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



Sekretaris



Drs. ZULFANIMI, M.I.Kom



Scanned with
CamScanner

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya ADINDA GITA LESTARI, NPM 1503110232 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 27 Maret 2019

Yang menyatakan,

Adinda Gita Lestari



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesempatan sehingga penulis menempuh jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) sampai kepada tahapan penyelesaian skripsi yang berjudul "POLA KOMUNIKASI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA". Dan tidak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil'alamin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dari dasar hati penulis ingin mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT karena tanpa rahmat dan ridho-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya **Ayahanda Suyatno** dan **Almh. Ibunda Sri Wardhani** serta **Ibu Sugiarti**, engkau adalah orang tua nomor satu di dunia ini. Terimakasih atas seluruh kasih sayang, yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan serta selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sampai dengan sekarang ini serta menyadari segala apa yang penulis lakukan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan insan yang baik hati. Serta abang penulis

Bagoes Maulana, M.Kom dan kakak penulis **Indah Puspita Sari, S.S** yang merupakan bagian dari hidup penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan dari sejak penulis lahir hingga sekarang ini.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhasannah Nasution,S.Sos.,M.I.Kom selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Said Harahap, S.Sos., M.I.Kom selaku Dosen Penasehat Akademik.

8. Ma'am Elvita Yenni, S.S., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Bapak Suyatno, Bapak Romi, Bapak Ruswadi dan Bapak Sutikno yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi saya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.
11. Kepada Muhammad Iqbal sebagai salah satu pendukung di balik layar yang selalu memberi dukungan dan semangat selama penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu saling mengingatkan dalam pengerjaannya dan yang selalu mau direpotkan, Tim Avengers Desi Irmayani, Febri Wulandari, Widi Pratiwi, Ilmawaty Nasution, Abdurrahman Zuhdi, Rahmad Ependi, Azura Salsabila, Luluk Kurnia, Mutia dan teman-teman *Women's Traveling* lainnya.
13. Adik-adik kos Yola Monika, Rizka Ade Gita, dan Dea Neira Zahara yang selalu mendukung penelitian ini hingga selesai.
14. Buat sahabat-sahabatku sedari SMA Hilda, Anis dan May, yang selalu memberi dukungan untuk penulis dalam penelitian ini.

15. Buat seluruh teman-teman IKO HUMAS B Sore, terimakasih untuk perjuangan yang telah kita lewati bersama selama masa perkuliahan ini berlangsung.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati pembaca.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2019

Adinda Gita Lestari

1503110232

**POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA
(KABUPATEN SIMALUNGUN)**

ADINDA GITA LESTARI
1503110232

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana proses penyampaian yang dilakukan Kepala Desa dalam penyampaian upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa. Dalam penyampaian hal ini tentu saja terdapat hambatan sebelum proses dari program alokasi dana desa. Kepala Desa dan perangkat Desa bekerja sama dalam menyampaikan hal ini kepada masyarakat dan tidak ada satu pun pesan yang tertinggal terkait informasi yang akan disampaikan. Dalam penyampaiannya adanya indikator yang dilakukan sebelum memulai program alokasi dana desa di Desa Sakhuda Bayu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Informasi Organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik data primer, yaitu wawancara dan observasi serta teknik data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa ialah disampaikan dan dilakukan dengan baik dan dapat diterima dengan baik serta tepat sasaran dan menghasilkan perubahan. Dari segi penyampaian, informasi yang disampaikan mengenai alokasi dana desa sudah efektif dan tepat sasaran sehingga program alokasi dana desa ini bisa berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Pola Komunikasi, Informasi Organisasi, Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Komunikasi	7
2.1.1 Definisi Komunikasi	7
2.1.2 Proses Komunikasi	8
2.1.3 Unsur-unsur Komunikasi	9
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Komunikasi	10
2.2 Komunikasi Organisasi	12
2.2.1 Definisi Komunikasi Organisasi	12
2.2.2 Komponen Komunikasi Organisasi	13
2.2.3 Tujuan Komunikasi Organisasi	14

2.2.4 Fungsi Komunikasi Organisasi	14
2.2.5 Jenis-jenis Komunikasi Organisasi	16
2.2.6 Hambatan Komunikasi Organisasi	17
2.3 Kepala Desa	18
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	18
2.3.2 Wewenang Kepala Desa	20
2.4. Pemberdayaan Masyarakat	21
2.4.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	21
2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	22
2.4.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	22
2.4.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	24
2.5 Alokasi Dana Desa	25
2.6 Teori Informasi Organisasi	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Kerangka Konsep	31
3.3 Definisi Konsep	32
3.4 Kategorisasi Penelitian	33
3.5 Informan dan Narasumber	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	37
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.2 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep	31
3.9 Struktur Pemerintahan Desa Sahkuda Bayu	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumannya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini di antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong tumbuhnya masyarakat desa yang mandiri, inovatif dan kreatif dalam segala aspek kehidupan. Diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi peluang desa untuk menjadi daerah yang otonom. Sejalan dengan itu Kepala Desa juga diharapkan menjadi salah satu aktor utama pembangunan dalam mengkokretisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi. Di mana saat ini komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.

Tentu, komunikasi Kepala Desa dengan pegawai serta masyarakat juga sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Adanya komunikasi Kepala Desa dengan masyarakat tersebut membantu untuk mendorong masyarakat agar sama-sama membangun desa seperti yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Alokasi dana desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung keterlibatan masyarakat

desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, Badan Perwakilan Desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengatur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan, frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan, tingkat kemudahan penyelenggara program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan, jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian, jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan, intensitas kegiatan dan pengendalian masalah, meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, berkurangnya masyarakat yang menderita sakit, dan meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan serta meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat. (Sumber : Jurnal Moh. Sofiyanto dkk)

Berdasarkan informasi yang dilansir dari TribunNews.com, pengalokasian Dana Desa ini pun tak sembarangan. Berdasarkan kebijakan pengalokasian dana desa pada [APBN](#) 2015-2017, atas capaian yang kini telah diraih, dana desa terbagi menjadi 90 persen porsi yang dibagi rata (alokasi dasar) dan 10 persen berdasarkan formula (alokasi formula). Alokasi formula ini terbagi menjadi jumlah penduduk desa sebesar 25 persen, angka kemiskinan desa sebesar 35 persen, luas wilayah desa sebesar 10 persen dan tingkat kesulitan geografi desa sebesar 30 persen.

Semua alokasi tersebut bisa digunakan oleh desa dan desa adat, yang ditransfer melalui [APBD](#) Kabupaten/Kota dan kemudian dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Diharapkan dari Dana Desa ini pembangunan desa dapat ditingkatkan sehingga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar. Hingga pada akhirnya semua tujuan pembangunan kawasan pedesaan seperti mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan bisa menjadi kenyataan sehingga martabat, kehidupan dan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik dan terangkat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan di atas, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)”.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang komunikasi kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Sahkuda Bayu Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana Desa?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian paparan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis ialah bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi organisasi.

b) Manfaat Secara Akademis

Secara Akademis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

c) Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dalam pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengetahuan komunikasi, komunikasi organisasi, kepala desa, pemberdayaan masyarakat, alokasi dana desa dan teori informasi organisasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai bagaimana Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi

2.1.1 Definisi Komunikasi

Komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin *communis* yang artinya sama *communication* atau *communicare* yang berarti membuat sama (*to make common*). Komunikasi menyatakan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut sama.

Everet M. Rogers dalam Cangara (2013 : 33) seorang pakar Sosiologi Pedesaan Amerika yang kemudian banyak memberi perhatian pada riset komunikasi khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi komunikasi, yaitu : “komunikasi adalah di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima a

tau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”.

Hovland, Janis dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh Forsdale (1981) adalah ahli sosiologi Amerika, Mengatakan bahwa, “*Communication is the process by which an individual transmits stimully (usually verbal) to modify the behavior of other indivisuals*. Dengan kata-kata lain komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. (Cangara, 2014 : 35-36)

Carl I. Hovland (Mulyana, 2016 : 68) mengemukakan komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan

(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate).

Raymond S. Ross (Mulyana, 2016 : 69) mengemukakan komunikasi (intensional) adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan symbol-symbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.

Menurut Harold Laswell (Mulyana, 2016 : 69) cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?* Atau “Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?”

2.1.2 Proses Komunikasi

Berdasarkan Paradigma Laswell, proses komunikasi dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. (Mukarom, 2015 : 77-78).

1. Proses Komunikasi Secara Primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan/atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media partner dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa) dan pesan non verbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya) yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator pada komunikan.

2. Proses Komunikasi Sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, rdio, televise, film dan sebagainya adala media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang dapat diklarifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televise, radio, dan sebagainya) dan media nirmassa (telepon, surat, megapon dan sebagainya).

2.1.3 Unsur-unsur Komunikasi

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu (Mulyana, 2016 : 69-71)

1. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk komunikasi.
2. Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kedua penerima.
Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber lain.
3. Saluran atau media yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.
4. Penerima (*Receiver*) yang juga sering disebut sasaran/ tujuan (*destination*), komunikate (*commmunicatee*), penyandi-balik (*decoder*) atau khalayak

(*audience*), pendengar (*listener*), penafsir (*interpreter*), yakni orang yang menerima pesan dari sumber.

5. Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan dan lain-lain.

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, maka fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut : (Widjaja, 2010 : 09-11)

- 1) Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan.
- 2) Sosialisasi (perasyarakatatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat.
- 3) Motivasi : menjelaskan setiap tujuan masyarakat yang pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- 4) Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang perlu dilakukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah public yang menyangkut kepentingan bersama di tingkat nasional dan lokal.

- 5) Pendidikan : pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual.
- 6) Memajukan kebudayaan : penyebraran hasil kebudayaan dan seni dengan baik dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, membangunkan imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.
- 7) Hiburan : penyebarluasan sinyal, simbol, suara dan image dari drama, tari, kesenian, kesusasteraan music, olah raga, permainan dan lain-lain.
- 8) Integrasi : menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal dan mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan keinginan orang lain.

Pada umumnya komunikasi mempunyai beberapa tujuan antara lain :

- 1) Sebagai pejabat ataupun komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) atau bawahan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita maksud.
- 2) Kita sebagai pejabat atau pimpinan harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan mereka menginginkan arah untuk pergi ke Barat tetapi kita memberikan jalan ke Timur.
- 3) Kita harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan yang persuasif bukan memaksakan kehendak.

Jadi secara singkat dapat kita katakan bahwa komunikasi itu bertujuan untuk mengharapkan pengertian, dukungan gagasan, dan tindakan. Setiap kali kita bermaksud mengadakan komunikasi maka kita perlu meneliti apa yang menjadi tujuan kita.

2.2 Komunikasi Organisasi

2.2.1 Definisi Komunikasi Organisasi

R. Wayne Pace dan Don F. Faules yang dialihbahasakan oleh Mulyana (2001: 31-32) mengemukakan definisi fungsional komunikasi organisasi sebagai pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi, dengan demikian, terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. (Ruliana, 2014: 17-18).

Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program.

Goldhaber (1986) memberikan definisi komunikasi organisasi berikut *“organizational communication is the process of creating and exchanging message within a network of interdependent relationship to cope with environmental uncertainly”*. Atau dengan kata-kata lain komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

Thayer menggunakan pendekatan sistem secara umum dalam memandang komunikasi organisasi. Dia mengatakan komunikasi organisasi sebagai arus data yang akan melayani komunikasi organisasi dan proses interkomunikasi dalam beberapa cara. Dia memperkenalkan tiga sistem komunikasi dalam organisasi yaitu : (a) berkenaan dengan organisasi; (b) berkenaan dengan pengaturan organisasi seperti perintah-perintah, aturan-aturan, dan petunjuk-petunjuk; (c) berkenaan dengan pemeliharaan dan pengembangan organisasi. Yang termasuk bagian ini di antara lain hubungan dengan personal dan masyarakat, pembuatan iklan dan latihan.

2.2.2 Komponen Komunikasi Organisasi

Dalam proses komunikasi organisasi, ada beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan. Adapun komponennya adalah sebagai berikut:

1. Jalur komunikasi internal, eksternal, atas-bawah, bawah-atas, horizontal, serta jaringan.
2. Induksi, antara lain orientasi tersembunyi dari para karyawan, kebijakan dan prosedur, serta keuntungan para karyawan.
3. Saluran, antara lain media elektronik (email, internet), media cetak (memo, surat menyurat, bulletin) dan tatap muka.
4. Rapat, antara lain *briefing*, rapat staf, rapat proyek dan dengar pendapat umum.
5. Wawancara, antara lain seleksi, tampilan kerja dan promosi karier.

2.2.3 Tujuan Komunikasi Organisasi

Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Koontz, dalam arti yang lebih luas,

tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan untuk memengaruhi tindakan ke arah kesejahteraan perusahaan. Sementara itu, Liliweri (2013:372-373) mengemukakan bahwa ada empat tujuan komunikasi organisasi, yakni:

1. Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat.
2. Membagi informasi.
3. Menyatakan perasaan dan emosi.
4. Melakukan koordinasi.

2.2.4 Fungsi Komunikasi Organisasi

Menurut Lili Weru (2014: 373-374), ada dua fungsi komunikasi organisasi yaitu yang bersifat umum dan khusus. Di bawah ini akan dijabarkan dua fungsi tersebut.

1. Fungsi umum

- a. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Contoh: deskripsi pekerjaan (*job description*).
- b. Komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat dan fakta. Termasuk juga menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan subjek layanan. Contoh *public relation*, pameran, ekspo dan lain-lain.
- c. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pada karyawan, agar mereka bisa belajar dari orang lain (internal), belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain

tentang apa yang “dijual” atau yang diceritakan orang lain tentang organisasinya.

- d. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan, dan besaran kekuasaan dan kewenangan, serta menentukan bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, dan mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan teknik dalam organisasi.

2. Fungsi khusus

- a. Membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando atau perintah.
- b. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antarsesama bagi peningkatan produk organisasi.
- c. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti.

Sehungan dengan fungsi organisasi di atas, Charles Conrad (1985) juga menyatakan ada dua fungsi komunikasi organisasi, yaitu fungsi komando dan fungsi relasi yang mendukung organisasi dalam pengambilan keputusan, terutama ketika organisasi menghadapi situasi yang kurang menentu.

1. Fungsi komando

- a. Mengarahkan dan membatasi tindakan.
- b. Menangani dan memelihara tampilan yang dekat melalui umpan balik.

- c. Menggunakan publikasi dan intruksi.

2. Fungsi relasi

- a. Menciptakan dan melanjutkan sifat impersonal dalam organisasi.
- b. Membuat koordinasi antarunit kegiatan.
- c. Menentukan dan mendefinisikan peran organisasi.

2.2.5 Jenis-jenis Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasar beberapa jenis.

Berdasarkan arahnya, komunikasi yang terjadi bisa berbentuk :

1. Komunikasi ke bawah, komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya.
2. Komunikasi ke atas, ketika bawahan memberikan umpan balik pada atasan, atau komunikasi yang terjadi ketika bawahan (*subordinate*) mengirim pesan kepada atasannya
3. Komunikasi lateral, komunikasi horizontal sesama anggota dalam kelompok. Komunikasi ini digunakan untuk mempermudah terjadinya koordinasi di antar kelompok sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara anggota. (Bismala, 2015: 152).

Dari aspek penyampaian, maka komunikasi dibedakan menjadi :

1. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan dengan memakai kata-kata yang dapat dimengerti baik berupa tulisan maupun lisan.

2. Komunikasi non verbal, yaitu komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan melalui symbol, isyarat atau perilaku tertentu, seperti bahasa tubuh. (Bismala, 2015: 153).

2.2.6 Hambatan dalam Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang terjadi di antara berbagai pihak tidak selalu dapat berjalan mulus tanpa batasan. Pada beberapa kasus, pesan seringkali gagal disampaikan/ dipahami, atau bahkan dipahami secara berbeda oleh penerima pesan. Hambatan-hambatan dalam komunikasi ini meliputi:

1. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yaitu hambatan yang muncul karena keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Jenis hambatan teknis dalam komunikasi meliputi:

1. Tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas
2. Kurangnya informasi atau penjelasan
3. Kurangnya keterampilan membaca
4. Pemilihan media/ saluran yang kurang tepat.

2. Hambatan Semantik

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif, yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian (komunikator dan komunikan), tetapi seringkali proses penafsirannya keliru.

3. Hambatan Manusiawi

Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor, emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau

ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Hahambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia meliputi:

1. Perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi, keterampilan mendengarkan, perbedaan status, pencairan informasi, penyaringan informasi.
2. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi.
3. Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan prilaku staf dan efektifitas komunikasi organisasi.

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jabatan kepala desa disebut dengan nama lain, misalnya wali nigari (Sumatera Barat), pembakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pematang dan Indramayu).

Kepala desa adalah alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Perangkat desa adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Perwakilan Desa), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Perwakilan Desa), menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Perwakilan Desa), membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Wewenang Kepala Desa

Wewenang kepala desa antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPC, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untung (2014:63) pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya, pemodal, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan serta pembelajaran menuju kemandirian.

Zubaedi (2013:75-79) mengemukakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan yang terdiri dari pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespons dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsut pengendali ketepatan distribusi asset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan masyarakat.

Menurut Adisasmita (Karimah dkk : 2014) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (d) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efesiensi).

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Untung (2014:63) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat setempat tanpa dukungan pihak luar untuk mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (Karimah dkk: 2014) adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marijinal dan kaum kecil.

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomi sehingga mereka lebih mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

2.4.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Wulandari (2014:16-17) tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan/keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyaluran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/actor/pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakodisi, supaya dapat memfasilitasiberlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran

mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan dan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi, masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah tahap pengayaan atau peningkatan dan intelektualitas dan kecakapan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini sering kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau peranan utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitatornya saja.

2.4.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (Karimah dkk:2014) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain :

1. *The welfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.
2. *The development approach* yaitu pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach* yaitu pendekatan yang melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

2.5 Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (Rahum : 2015) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (Rahum : 2015) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenang desa mencakup (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi oleh Negara; (b) kewenangan atribut organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan

oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesehjahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesehjahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesehjahteraan dan tara hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan (Widjaja, 2010 : 133)

Menurut Hanif Nurcholis (Rahum : 2015) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Rozaki dkk (Karimah : 2014) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan

dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan melibatkan seluruh masyarakat desa.

2.6 Teori Informasi Organisasi

Teori informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Teori ini menekankan proses di mana individu mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi.

Focus dari teori informasi organisasi adalah komunikasi informasi, hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sangatlah jarang satu orang atau satu bagian dapada perusahaan memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Informasi yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber. Namun demikian, tugas mengelola atau memproses informasi tidaklah sekedar bagaimana memperoleh informasi, bagian tersulit adalah bagaimana memahami informasi dan mendistribusikan informasi yang diterima itu dalam organisasi.

Teori informasi organisasi menjelaskan bagaimna organisasi memahami informasi yang membingungkan dan multitafsir. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Asumsi dasar teori ini adalah :

- 1) Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi
- 2) Informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya.
- 3) Organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian pinformasi.

Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi, ini berarti bahwa organisasi bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi secara efektif dan untuk dapat mencapai tujuannya. Setiap hari organisasi dan anggotanya menerima banyak sekali informasi (stimuli) yang berasal dari lingkungannya, namun tidak semua informasi dapat diproses lebih lanjut.

Asumsi kedua yang dikemukakan Weick menyatakan bahwa informasi yang diterima suatu organisasi berbeda-beda dalam hal tingkat kepastiannya. Dengan kata lain suatu informasi dapat memiliki lebih dari satu makna sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Organisasi lebih bergantung pada informasi dan menerima informasi dalam jumlah besar. Tantangannya terletak pada kemampuan organisasi untuk memahami informasi yang diterima.

Dalam upaya mengurangi ambiguitas informasi maka asumsi Weick ketiga mengemukakan bahwa organisasi terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Menurut Weick, kegiatan organisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi, dan proses untuk mengurangi ketidakpastian kegiatan bersama di antara anggota organisasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi bergantung satu sama lain dalam upaya mengurangi ketidakpastian.

Proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan proses evaluasi yang terdiri atas tiga tahap yaitu :

1) Penerimaan Informasi (*Enactment*)

Tahap pertama dalam proses untuk mengurangi ketidakpastian adalah tahap penerimaan informasi. Istilah yang digunakan Karl Weick pada tahap penerimaan informasi ini adalah *enactment* yang diartikannya sebagai *the definition of the situation, or registering the presence of equivocal information from outside* (definisi situasi, atau mendaftarkan adanya informasi yang tidak pasti dari luar). Pada tahap *enactment* atau definisi situasi anggota organisasi mencatat atau mendaftarkan adanya kehadiran informasi yang tidak pasti yang berasal dari luar organisasi. Pada tahap ini, orang akan memberikan perhatiannya terhadap rangsangan atau stimuli dan mengetahui akan ketidakpastian. Penerimaan informasi mengacu pada proses bagaimana suatu informasi yang diterima dan diinterpretasikan oleh organisasi. pada tahap ini, organisasi harus menganalisis masukan informasi (input) yang mereka terima untuk menentukan jumlah ketidakpastian yang ada dan memberikan makna terhadap informasi yang ada.

2) Seleksi

Proses kedua adalah seleksi yaitu proses di mana anggota organisasi menerima sejumlah informasi yang dianggap relevan dengan persoalan dan menolak informasi lain yang dinilai tidak relevan. Seleksi berfungsi untuk menyempitkan atau mengecurutkan luasnya persoalan dengan cara menolak alternatif yang tidak ingin ditangani pada saat itu. Proses ini adalah upaya menyingkirkan ketidakpastian yang muncul dari informasi yang diterima pada tahap awal.

West dan Turner menyatakan seleksi alam memilih metode terbaik untuk mendapatkan informasi. Ketika organisasi menggunakan berbagai aturan dan siklus untuk menginterpretasikan suatu input baru ke dalam lingkungannya maka organisasi harus menganalisis apa yang diketahuinya dan memilih metode terbaik untuk memperoleh informasi tambahan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian.

3) Retensi

Bagian ketiga dari proses organisasi adalah retensi yaitu proses menyimpan beberapa informasi yang akan digunakan pada waktu yang akan datang. Retensi adalah informasi yang disimpan atau diingat oleh organisasi dan setiap individu yang menjadi anggotanya. Informasi yang disimpan nantinya akan digabungkan dengan informasi yang sudah ada yang akan digunakan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya di masa depan.

BAB III

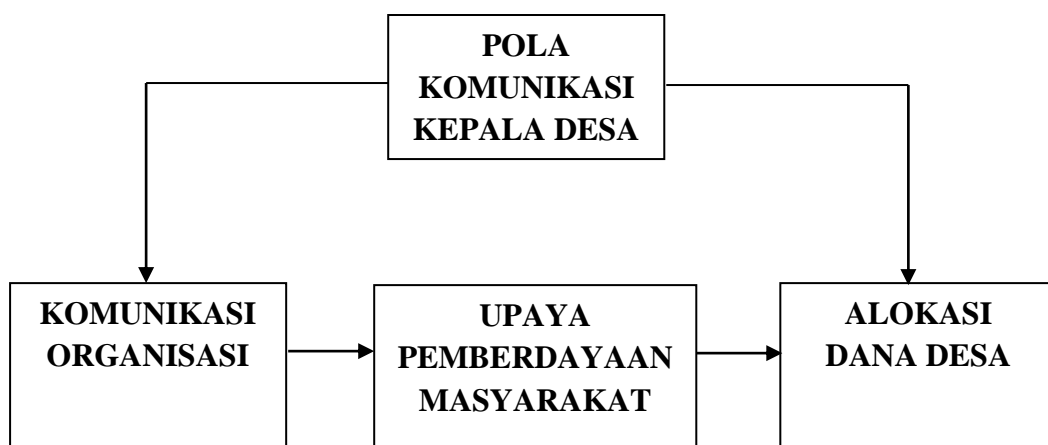
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto, 2010:166).

Penelitian ini menggambarkan objek penelitian melalui wawancara mendalam terhadap informan atau narasumber, sehingga dapat ditemukan gambaran bagaimana Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

1. Komunikasi

Carl I. Hovland mengemukakan komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate).

Everet M. Rogers dalam Cangara (2013 : 33) seorang pakar Sosiologi Pedesan Amerika yang kemudian banyak memberi perhatian pada riset komunikasi khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi komunikasi, yaitu : “komunikasi adalah di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerimaan atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”.

2. Komunikasi Organisasi

Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program.

3. Kepala Desa

Kepala desa adalah alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Perangkat desa adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

5. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan melibatkan seluruh masyarakat desa.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian dibuat agar wawancara riset penelitian penulis tidak lari dari jalur dan sesuai dengan judul skripsi penulis. Adapun kategorisasi penelitian penulis adalah sebagai berikut :

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa	Komunikasi Organisasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikator 2. Pesan : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan d. Pertanggung Jawaban 3. Media 4. Hambatan Alokasi Dana Desa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

3.5 Informan/Narasumber

Informan atau narasumber adalah orang-orang yang terlibat dalam objek penelitian yang akan dimanfaatkan penulis dalam menggali informasi terkait objek yang akan diteliti. Dalam konteks ini, narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan (Kaur Ekbang) dan Gamot Huta I atas.

No	Nama	Jabatan
1	Suyatno	Kepala Desa
2	Romi Sugianto	Sekretaris Desa
3	Ruswadi	Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan
4	Sutikno	Gamot (Kepala Dusun Huta I Atas)

3.6 Teknis Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dieproleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. (Ardial, 2014 : 359)

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Adapun wawancara yang digunakan adlah wawancara mendalam. Pada wawancara ini pewawancara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapat gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. (Bungin, 2011 : 157)

2. Observasi

Observasi menurut Matthews and Rose dalam Herdiansyah (2015 : 130) adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan

perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah dengan lingkungan sosialnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku, browsing bahan bacaan di internet, serta dokumen-dokumen. (Ardial, 2014 : 360).

3.7 Teknik Analisis Data

Bagdan & Biklen (2007) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditentukan. Spradley (1980) analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Gunawan, 2013:210).

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data lalu kemudian diinterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan diuraikan secara deskriptif untuk mengidentifikasi masalah bagaimana pola komunikasi kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa.

Dalam penelitian data dan pengolahan data sebagai berikut :

1. Penyeleksian data, pemeriksaan data kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Reduksi data/pembentukan abstraksi dengan data yang ada seperti observasi, wawancara dan inti sari dari dokumen.
3. Penyajian data melalui proses pencacatan, pengetikan, penyuntingan dan disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas.
4. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah tersusun, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2019 hingga Februari 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tercantum dan menjadi substansi penting dalam Undang-undang tersebut. Hal ini pula yang memberikan harapan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mewujudkan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Perubahan substansif yang dibawa oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak saja pada level Pemerintah Daerah, tetapi juga memberikan warna lain pada penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Hal ini didasari atas pentingnya mewujudkan Pemerintahan yang baik yang dimulai

dari level Pemerintahan paling bawah di mana pada tingkat Pemerintahan dengan masyarakat dalam rangka pemberian pelayanan pemerintahan. Di sanalah hubungan Pemerintahan itu menjadi nyata. Di sana juga terjadi control konsumen, control sosial, evaluasi, dan *feed back* Pemerintahan (Rizky, 2017 : 41-42).

Pematang Sakhuda adalah desa yang terletak di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Berdiri sejak tahun 1929, yang dikepalai oleh Kepala Desa Muhammad Najir Sitorus Pane. Pada akhir tahun 1999 desa ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa, yaitu Pematang Sakhuda sebagai Desa induk, Marihat Bukit dan Sakhuda Bayu. Setelah otonomi daerah pada tahun 2001, nama Desa disesuaikan dengan kearifan lokal Kabupaten Simalungun. Desa menjadi Nagori, dimana dalam bahasa Simalungun Desa adalah Nagori, yang dipimpin oleh Pangulu, yang artinya Kepala Desa. Pembagian susunan kelompok wilayah Nagori dibagi menjadi beberapa Dusun yang disebut menjadi Huta (dalam bahasa Simalungun) yang dipimpin oleh masing-masing Gamot (Kepala Dusun), sebagai perwakilan Huta.

Terdapat 6 dusun atau huta di Nagori Sakhuda Bayu, yaitu Huta I Atas, Huta I Bawah, Huta II, Huta III Atas, Huta III Bawah, dan Huta III Buntu. Nagori Sakhuda Bayu adalah nagori atau desa yang memiliki penduduk terbanyak dari 16 nagori atau desa yang berada di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Sebanyak lebih kurang 5500 jiwa yang bertempat tinggal di desa Sakhuda Bayu.

Pada tahun 1990-an masyarakat Nagori Sakhuda Bayu pada umumnya bermata pencaharian dari budi daya perikanan dan pertanian. Perikanan saat itu menjadi aset yang luar biasa bagi mereka yang menekuni bidangnya. Mata

pencapaian ini berkembang pesat sejak tahun 2000, sehingga dapat memenuhi pasar Sumatera Utara. Namun, pada tahun 2010, salah satu mata pencapaian yang sudah ditekuni sejak awal mengalami masa krisis atau gagal panen dikarenakan menyebarnya virus ikan yang berasal dari wilayah Danau Toba (Parapat), sehingga lumpuhlah salah satu mata pencapaian warga Nagori Sakhuda Bayu. Kemudian sebagian petani ikan pun beralih menjadi ke pertanian palawija dan hanya tinggal beberapa petani ikan saja yang masih menggeluti budi daya ikan hingga sampai saat ini. Adapun visi dan misi Nagori Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun yaitu

Visi :

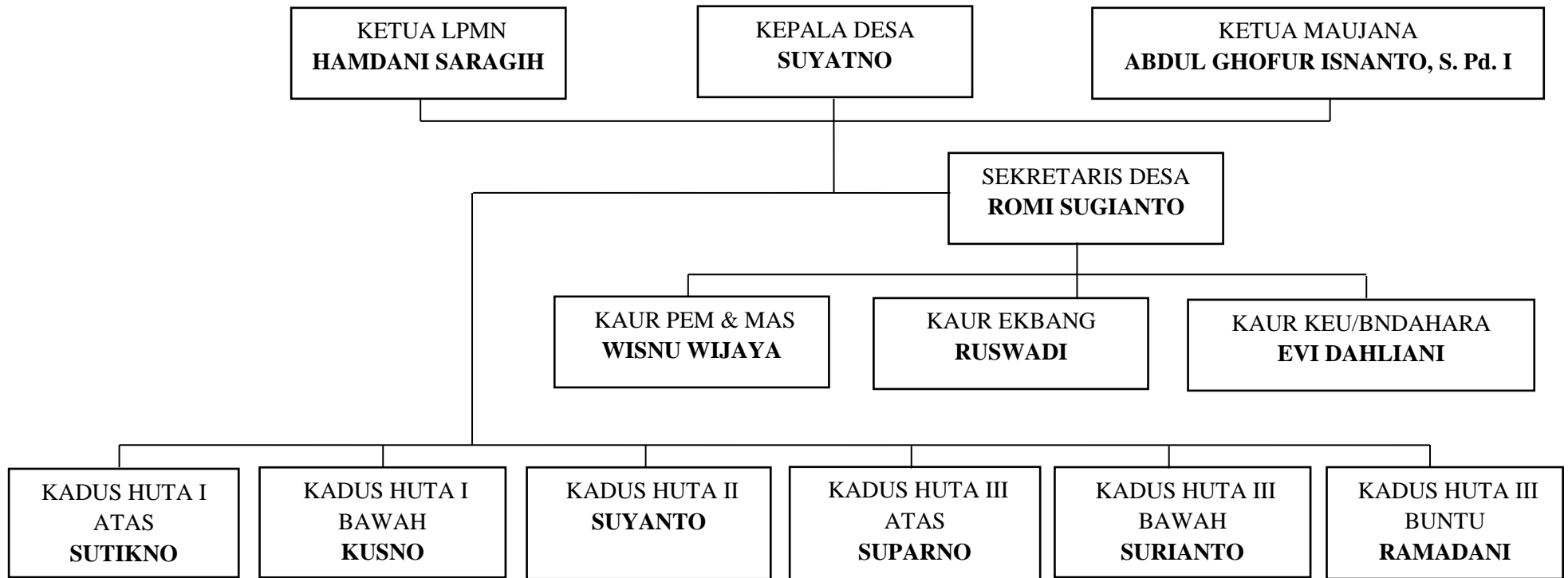
Bersama membangun Nagori Sakhuda Bayu menuju Sakhuda yang lebih maju dan mandiri.

Misi:

- Meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Nagori Sakhuda Bayu.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jalan maupun drainase sebagai penunjang perekonomian masyarakat.
- Meningkatkan SDM masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan sehingga memperoleh pengetahuan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dibarengi dengan penyuluhan para kaum ibu untuk menambah pendapatan keluarga melalui Home Industry.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi para remaja dan penyuluhan akan bahaya narkoba.

- Berupaya semaksimal mungkin agar Nagori Sakhuda Bayu dapat menjadi sentra perikanan air tawar seperti sebelum tahun 2011.

STRUKTUR PEMERINTAHAN
NAGORI SAHKUDA BAYU KECAMATAN GUNUNG MALELA
KABUPATEN SIMALUNGUN



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara yang disebut dengan data primer, yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi wawancara di mana hasil wawancara akan dideskripsikan berdasarkan jawaban responden. Untuk proses wawancara tersebut penulis membuat 9 pertanyaan.

Selain data primer, penulis juga mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, tulisan-tulisan dan referensi lainnya yang mempunyai relevansi langsung terkait Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Dsa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, yaitu dengan data sekunder.

Penulis menetapkan 4 (empat) narasumber yaitu Bapak Suyatno selaku Kepala Desa, Bapak Romi Sugianto selaku Sekretaris Desa, Bapak Ruswadi selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan (Kaur Ekbang), dan Bapak Sutikni selaku Kepala Dusun Huta I Atas desa Sakhuda Bayu.

Berikut adalah data narasumber tersebut :

1. Nama Lengkap : Suyatno
Jenis Kelamin : Laki-laki

- Agama : Islam
- Usia : 57 tahun
- Jabatan : Kepala Desa Sakhuda Bayu
2. Nama Lengkap : Romi Sugianto
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Usia : 50 tahun
- Jabatan : Sekretaris Desa Sakhuda Bayu
3. Nama Lengkap : Ruswadi
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Usia : 41 tahun
- Jabatan : Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan Sakhuda Bayu
4. Nama Lengkap : Sutikno
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Usia : 50 tahun
- Jabatan : Kepala Dusun Huta I Atas Sakhuda Bayu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di lapangan, maka dapat dianalisa tentang jawaban dari narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut.

1. Pola Komunikasi Kepala Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil wawancara langsung dari salah satu narasumber yaitu **Bapak Suyatno** selaku Kepala Desa Sakhuda Bayu, terkait

bagaimana pola komunikasi kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Sahkuda Bayu. Pada pertanyaan “bagaimana cara Bapak dalam menyampaikan informasi kepada pegawai dan masyarakat mengenai alokasi dana desa? Apakah secara langsung atau melalui tahapan?” Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam penyampaian pesan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa disampaikan melalui tahapan, yang artinya menggunakan pola komunikasi dari atas ke bawah. Tahapan yang dimaksud di sini adalah melalui pegawai terlebih dahulu, baik itu di kantor maupun melalui setiap kepala dusun yang ada di desa tersebut.

Mengenai media yang digunakan sesuai pertanyaan “media apa yang biasanya digunakan untuk penyebaran informasi menyeluruh kepada pegawai?” Beliau menjelaskan bahwa dalam penyampaiannya, media yang digunakan di sini adalah rapat. Rapat di sini ditujukan untuk bagaimana Kepala Desa menyampaikan mengenai alokasi dana desa bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pengawasannya. Walaupun sudah diprogramkan hal ini tetap harus dirapatkan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui rapat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan dalam penyampaian pesan tersebut, beliau mengatakan hambatan akan selalu ada dan terpulang lagi kepada SDM (Sumber Daya Manusia) manusianya. Penyampaian yang disampaikan mengenai hal ini tidak akan bisa hanya satu kali, jika ada kesulitan dalam penerimaan pesan tersebut, pegawai dan masyarakat bisa bertanya.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, perencanaan adalah salah satu hal yang dilakukan sebelum terjadinya

pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Dari hasil wawancara mengenai perencanaan, Bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sakhuda Bayu mengatakan sebelum dilakukannya pelaksanaan dan pengelolaan, seluruh perangkat desa dikumpulkan untuk melakukan musyawarah dusun (musdus) dibuat untuk pelaksanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yang pertama dilakukan adalah musyawarah dusun (musdus) guna untuk penyusunan RPJM, setelah RPJM dibuat, kemudian membuat skala prioritas RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Dari tahun ke tahun, misal 2018 apa yang akan dibangun dan kemudian penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) lalu setelah tersusun perencanaan tersebut dilakukanlah pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan terkait upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, Kepala Desa Sakhuda Bayu, Bapak Suyatno mengatakan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan apabila tidak dikerjakan dengan sesuai prosedur, maka seluruh perangkat desa akan mendapat teguran dari pengawas pemerintah kabupaten.

Program alokasi dana desa ini memerlukan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaannya. “Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau Kepala Desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa?” Bapak Suyatno menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Dusun di setiap dusun yang ada pelaksanaan program alokasi dana desa. Dalam hal ini masyarakat juga ikut andil untuk mengawasi jalannya program alokasi dana desa tersebut. Pelaksanaan alokasi dana desa ini namanya *swakelola* yang artinya masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan alokasi dana desa tersebut, khususnya

bagi masyarakat yang kurang mampu ikut bekerja atas hal ini, sesuai petunjuk yang telah diberikan, bagi masyarakat yang tidak memiliki lapangan pekerjaan dan yang tidak memiliki *skill* akan menunjukkan kemampuannya di dalam program ini dan mereka jadi memiliki lapangan pekerjaan dan dengan manfaat mereka memiliki kemampuan untuk merubah hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pertanggung jawaban atau pelaporan terkait alokasi dana desa, Kepala Desa Sakhuda Bayu mengatakan bahwa laporan yang diberikan berupa laporan administrasi, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kemudian pelaksanaan di lapangan fisik sesuai dengan *job desk* yang ada.

Dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa “apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pemanfaatan alokasi dana desa?” Dari pertanyaan di atas Kepala Desa Sakhuda Bayu, Bapak Suyatno mengatakan yaitu hambatan pasti selalu dari manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia), karena kehidupan di pedesaan untuk masalah SDM (Sumber Daya Manusia) masih banyak yang jauh dari harapan untuk mengerti apa itu program alokasi dana desa, keuntungannya apa bagi mereka dan banyak hal lainnya. Tapi, untuk hal ini lebih banyak masyarakat yang mendukung apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa. Program ini bertujuan untuk masyarakat desa sesuai sarana dan prasarana, jika tidak mendukung bagaimana ekonomi akan mencapai titik sasaran jika sarana dan prasarannya saja tidak mendukung.

Hasil wawancara dari Kepala Desa Sakhuda Bayu mengenai komunikasi efektif, Bapak Suyatno mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa mengatakan bahwa komunikasi yang beliau

sampaikan sudah efektif, karena kalau tidak efektif bagaimana pegawai saya itu akan menyampaikan kepada masyarakat, karena masyarakat luas ini perlu penjelasan yang sangat detail, akurat dan memang bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan kepada salah satu perangkat desa, **Bapak Romi Sugianto** selaku Sekretaris Desa mengenai bagaimana pola komunikasi Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa. Pertanyaan wawancara mengenai “apakah Bapak dapat menerima informasi mengenai alokasi dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa?” Ia mengatakan bahwa beliau dengan mudah dapat menerima informasi yang disampaikan Kepala Desa terkait alokasi dana desa. Selain jabatannya sebagai Sekretaris Desa, dalam hal alokasi dana desa beliau memiliki jabatan sebagai Tim Pembuat Komitmen (TPK). Tugas TPK adalah ketika dana desa itu turun, apabila untuk pembelanjaan barang-barang yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, tugas saya di sini adalah memverifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai media yang digunakan dalam penyampaian pesan atau informasi yang didapatkan dari Kepala Desa, ia menjelaskan bahwa media yang digunakan Kepala Desa dalam menyampaikan alokasi dana desa ini adalah dengan mengadakan rapat kecil yang di dalamnya seluruh perangkat-perangkat desa, kemudian ada musyawarah dusun yang terdapat beberapa tokoh masyarakat yang ikut andil di dalamnya serta dilakukannya musrembang (Musyawarah Rembuk Bangunan), kemudian di dalam musrembang itu nanti akan disampaikan apa-apa saja yang akan diajukan.

Mengenai hambatan yang biasanya sering terjadi dalam sebuah komunikasi, beliau mengatakan bahwa ia sendiri sebagai pegawai di bawah kepala

desa atau sekretaris desa mengatakan tidak adanya hambatan dalam penerimaan mengenai informasi ini, karena alokasi dana desa ini sudah diprogramkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengenai perencanaan, Bapak Romi yang mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat.

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan alokasi dana desa. beliau juga mengatakan dalam pelaksanaannya, pemanfaatan alokasi dana desa yang diturunkan ke desa tergantung di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), apa saja yang diusulkan dalam RPJM tersebut. Contohnya parit pasangan untuk kelancaran drainase, rabat beton, pembenahan dan perluasan jalan. Semua dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Kalau untuk alokasi dana desa ini bisa digunakan untuk BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagori), di situ terdapat pemberdayaan. Contohnya Desa Sakhuda Bayu mendapat bantuan dari pemerintah kelautan, yaitu mesin pelet untuk para petani yang menggeluti budi daya ikan.

Dari pertanyaan wawancara “apakah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan para pegawai sudah tepat?” Bapak Romi menjelaskan bahwa pengawasan dalam program alokasi dana desa dilakukan secara langsung oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan, serta seluruh perangkat desa juga ikut turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaporan atau pertanggung jawaban yang akan diberikan kepada Kepala Desa, ia mengatakan bahwa mengenai laporan pertanggung jawaban yang diberikan kepada Kepala Desa

adalah Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terlebih dahulu kemudian LPJ atau Laporan Pertanggung Jawaban.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat mengenai alokasi dana desa, Bapak Romi selaku Sekretaris Desa mengatakan “masyarakat Sakhuda Bayu tentang Alokasi Dana Desa ini sudah sangat senang, kerna di depan rumahnya sudah ada kita bangun rabat beton, dan parit pasangan. Tidak ada hambatan untuk masalah yang terkait dengan alokasi dana desa ini”.

Komunikasi yang dilakukan antara atasan ke bawahan dan begitu juga sebaliknya, pasti selalu ada yang namanya kesalahpahaman dalam menerima informasi atau pesan yang disampaikan dan ada yang dengan mudah menerima informasi tersebut dengan mudah. Beliau mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa dalam penyampaian pesan sudah tepat dan berjalan dengan lancar. Dari hal tersebut sudah bisa dilihat sendiri dari semua yang sudah dibuat di Desa ini.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam mewawancarai narasumber sebagai salah satu perangkat desa, **Bapak Ruswadi** selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan (Kaur Ekbang) terkait bagaimana pola komunikasi Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, “apakah Bapak dapat menerima informasi mengenai alokasi dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa?” Ia mengatakan bahwa ia dengan mudah dapat menerima informasi yang disampaikan Kepala Desa mengenai alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruswadi, mengenai media yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah dengan menggunakan media sosial berupa *WhatsApp Group* serta SMS ke seluruh perangkat desa. Informasi tersebut langsung disampaikan untuk pemberitahuan bahwa akan diadakannya rapat dan di situ akan diberitahu semua informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Pertanyaan wawancara mengenai “adakah hambatan dalam menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?” Beliau menjawab bahwa hambatan dalam penyampaian pesan atau informasi tersebut pasti selalu ada, kendala dalam penerimaan informasi yang kurang dimengerti oleh kami sebagai bawahan dari Kepala Desa dan untuk menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat pasti ada kendalanya, terutama kepada masyarakat yang kurang memahami bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat-masyarakat awam, jadi di saat dilakukan rapat serta musyawarah Kepala Desa menyampaikannya dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi yang telah disampaikan. Dalam rapat dan musyawarah terkait alokasi dana desa, selalu mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat seperti LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori), BPD (Badan Perwakilan Desa), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Kader Posyandu, Bidan Desa dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ruswadi mengenai perencanaan dan pelaksanaan, ia mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan di Desa Sakhuda Bayu sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada dari pemerintah daerah dan kabupaten. Pelaksanaan program alokasi dana desa tidak ada kendala dalam

pelaksanaannya, karena segala sesuatunya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan Undang-undang dan peraturan kabupaten.

Hasil penelitian dari wawancara dari Bapak Ruswadi mengenai pengawasan dan laporan pertanggung jawaban, ia mengatakan bahwa selalu diadakannya pengawasan kepada pekerjaan atau pelaksanaan program alokasi dana desa, yang ikut serta dalam melakukan pengawasan ada lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) atau maujana. Laporan pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa yang diberikan kepada Kepala Desa adalah laporan secara tertulis yang akan diterima langsung oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ruswadi selaku narasumber, Bapak Ruswadi mengatakan tidak adanya hambatan yang menghambat terkait alokasi dana desa, karena apa yang dikerjakan selalu dibuat papan transparansi atau papan pengumuman saat melakukan pekerjaan alokasi dana desa.

Dalam penyampaian informasi yang dilakukan kepala desa, narasumber mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan Kepala Desa bisa dibilang efektif, bisa dibilang tidak efektif. Karena kebanyakan masyarakat dan perangkat desa sebagai bawahan dari Kepala Desa masih banyak kurang memahmi aturan-aturan yang ada, tapi dalam penyampaian informasi terkait alokasi dana desa ini bisa kami terima dengan baik dan komunikasi yang kami jalani berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian dari penulis dengan wawancara langsung yang dilakukan dengan narasumber terakhir yaitu **Bapak Sutikno**, selaku Kepala Dusun terkait bagaimana pola komunikasi Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa. Mengenai “Apakah Bapak dapat menerima informasi mengenai alokasi dana desa yang disampaikan oleh Kepala

Desa?” Kemudian beliau menjawab bahwa dengan adanya informasi yang disampaikan, seluruh perangkat desa dapat menerima informasi ini dengan baik dan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai media apa yang digunakan, beliau menjelaskan bahwa penyebaran pesan yang disampaikan sebelum dikumpulkannya seluruh perangkat desa itu melalui media sosial. Untuk mendapatkan info-info ini lebih mudah dengan adanya media sosial, apalagi sudah adanya *WhatsApp Group* yang di dalamnya terdapat seluruh perangkat desa, dan terkait alokasi dana desa ini, pesan yang disampaikan ditujukan untuk akan diadkannya rapat di Balai Desa Sakhuda Bayu.

Mengenai hambatan dalam penerimaan informasi terkait alokasi dana desa, dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa hambatan dalam penerimaan informasi terkait alokasi dana desa ini selalu ada. Adanya *miscommunication* pasti selalu ada di dalam sebuah forum atau rapat, tapi setelahnya perangkat desa menerimanya dengan baik, berbeda lagi ketika akan disampaikan kepada masyarakat. Contohnya, di saat seluruh Kepala dusun sudah mulai untuk menyebarkan informasi terkait lokasi dana desa, akan ada masyarakat awam yang pasti kurang memahami apa yang akan disampaikan dan tidak semudah ketika kami perangkat desa menerima apa yang disampaikan Kepala Desa, di mana penjelasan tersebut harus dilakukan dengan cara berulang-ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sutikno mengenai perencanaan alokasi dana desa. Ia mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah tepat, karena perencanaan tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat itu juga. Contohnya warga yang memiliki lahan pertanian sudah diberikannya

kemudahan untuk menuju ke lahan tani tersebut dengan adanya rabat beton dan juga adanya perluasan jalan. Warga lebih mudah untuk mengutip hasil panen dari lahan yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan, ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan dalam alokasi dana desa ini juga sudah sangat tepat. Karena sasarannya itu juga untuk masyarakat agar semua yang dilakukan terkait alokasi dana desa ini sudah tepat guna, tidak adanya lagi jalan-jalan yang berlubang untuk para petani yang menuju ke lahan taninya.

Hasil dari wawancara dengan Kepala dusun mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan serta pelaporan atau pertanggung jawaban yang dilaporkan, Bapak Sutikno mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan juga sudah tepat. Karena pengawasa dari desa sudah cukup dengan adanya lembaga yang dimiliki di Desa Sakhuda Bayu. Mengenai pelaporan atau pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa, kami sebagai perangkat memberikn laporan tertulis, yang akan dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten melalui SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang kami berikan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana desa, beliau mengatakan faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalu ada. Banyak masyarakat yang menerima hal ini dan beberapa masyarakat yang menjadi faktor penghambatnya. Contohnya, masyarakat itu mengira tanah yang mereka miliki sedikit dikurangi karna adanya pembesaran jalan yang akan dibuat rabat beton, tapi kita juga melihat manfaatnya ke depan yang dampaknya untuk mereka jauh lebih besar.

Dalam penyampaian informasi terkait alokasi dana desa yang disampaikan Kepala Desa, Beliau mengatakan bahwa pesan atau informasi yang disampaikan Kepala Desa sudah efektif dan berjalan dengan lancar. Sebagai perwakilan Kepala Dusun, beliau juga menyampaikan bahwa mereka selalu sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa jika untuk pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya positif untuk masyarakat. Karena dengan adanya kerja sama Kepala Desa dengan Kepala Dusun serta seluruh perangkat desa mudah-mudahan informasi terkait masyarakat akan berjalan dengan lancar dan selalu bisa diterima dengan baik.

4.2 Pembahasan

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam setiap gerak kehidupan manusia, khususnya bagi sebuah organisasi yang memiliki program-program untuk memajukan organisasi tersebut demi kepentingan masyarakat. Pola komunikasi juga penting dalam sebuah organisasi untuk mengetahui pola apa yang digunakan seorang pemimpin untuk menyampaikan informasi yang disampaikan kepada anggotanya.

Pola komunikasi adalah bentuk komunikasi yang digunakan seseorang dalam menyampaikan informasi kepada penerima (komunikan). Terdapat beberapa pola komunikasi yang ada di dalam komunikasi organisasi, seperti komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola komunikasi dari atas ke bawah dan komunikasi dari bawah ke atas.

Pola komunikasi ini digunakan untuk tercapainya tujuan organisasi demi kepentingan masyarakat terkait alokasi dana desa yang sudah menjadi program pemerintah sejak tahun 2015. Keefektifan komunikasi organisasi dalam sebuah organisasi sangat perlu, karena dalam sebuah organisasi kita dituntut untuk bisa menyampaikan dan menerima informasi tersebut dengan baik dan benar. Dalam hal ini pasti ada hambatan-hambatan dalam penyampaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berjumlah 4 (empat) orang, di antaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Ekbang dan Kadus Huta I Atas, penulis tidak menemukan hambatan dalam melakukan proses wawancara, karena semua narasumber memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan sangat terbuka sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan Kepala Desa kepada para pegawainya disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik dari segala segi penyampaiannya. Dalam penyampaian pesan mengenai alokasi dana desa, media yang digunakan ini adalah Rapat. Rapat atau musyawarah sangat penting dilakukan dalam sebuah organisasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam organisasi tersebut demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. seperti halnya, alokasi dana desa juga perlu dirapatkan walaupun hal ini sudah diprogramkan oleh pemerintah. Penyampaian alokasi dana desa ini disampaikan dengan sangat detail dan diumumkan ke masyarakat melalui papan pengumuman yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, rapat adalah media yang sangat efektif dalam menyampaikan hal tersebut.

Dalam komunikasi organisasi, rapat adalah salah satu media yang digunakan dalam sebuah organisasi. Rapat itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Rapat adalah salah satu kesempatan para pegawai untuk mengutarakan segala pendapat mengenai tema rapat tersebut. Hambatan dalam penyampaian informasi pasti akan selalu ada di dalam forum organisasi. Hambatan tersebut bisa saja perdebatan antara anggota karna tidak menyetujui pendapat pihak lain atau pun hambatan dalam menerima informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, Kepala Desa sendiri menyampaikannya dengan sangat penuh penjelasan detail agar segala sesuatunya yang akan dijalankan dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan lancar. Selain dari pada itu, rapat mengenai alokasi dana desa yang dilakukan ini tidak hanya melibatkan perangkat inti desa, tetapi juga melibatkan beberapa lembaga masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat, yaitu LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori), BPD (Badan Perwakilan Daerah), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ibu PKK, dan Kader Posyandu.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa sudah terealisasi sesuai dengan informasi yang didapat penulis dari semua narasumber. Narasumber memberikan informasi terkait perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa demi kesejahteraan desa itu sendiri. Sebelum pelaksanaan program alokasi dana desa, sudah dijelaskan di atas bahwa sudah ada dilakukannya rapat mengenai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), di dalam hal ini nantinya akan dikomunikasikan atau didiskusikan dengan perangkat desa tentang apa saja yang akan dibangun untuk Desa Sahkuda Bayu. Setelah dibuatnya RPJM tersebut, lalu perangkat desa akan membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) terkait program alokasi dana desa, setelahnya

pemerintah desa akan membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) untuk melakukan program Alokasi Dana Desa tersebut.

Perencanaan yang disusun untuk program alokasi dana desa ini sudah sangat tepat dan sudah berjalan selama beberapa tahun silam sejak adanya program alokasi dana desa. Pelaksanaan program alokasi dana desa ini harus dilakukan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Jika tidak, akan ada peneguran dari pihak-pihak pengawas yang akan turun langsung ke tempat lokasi pengerjaan tersebut. Seperti yang telah penulis ketahui, bahwa pelaksanaan alokasi dana desa ini sudah berjalan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang ada.

Pengawasan terhadap program alokasi dana desa juga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaannya. Alokasi dana desa ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Program alokasi dana desa adalah program yang sangat sensitif bagi mereka atau bagi masyarakat yang sudah mengetahui tentang program ini. Terkait masalah dana yang diturunkan tidaklah sedikit tentu saja menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Namun, Desa Sakhuda Bayu merealisasikan dana ini sesuai dengan Rancangan yang sudah dibuat di perencanaan yang sudah ditetapkan. Pembangunan rabat beton, parit pasangan dan pembenahan jalan sudah dilakukan di setiap dusun yang ada guna mempermudah masyarakat untuk mengakses jalan yang mereka tempuh selama menuju ke lahan tani dan lahan budi daya ikan yang

merek miliki. Pengawasan ini dilakukan dengan masyarakat yang juga ikut turun tangan melihat proses pengerjaannya, serta beberapa lembaga desa yang ikut serta dalam proses pengawasannya. Program alokasi dana desa ini tidak dijalankan hanya di satu dusun saja, melainkan di setiap dusun yang memang membutuhkan perbaikan tersebut. Program alokasi dana desa ini juga membantu masyarakat desa yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Ketika ada program ini, masyarakat desa yang sementara yang belum memiliki lapangan pekerjaan bisa ikut turun tangan dalam pengerjaannya.

Laporan pertanggung jawaban yang diberikan nantinya berupa data-data terkait alokasi dana desa. Pegawai-pegawai akan merekap berkas-berkas alokasi dana desa yang nantinya pekerjaan tersebut akan dilihat langsung oleh Kepala Desa sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten. Laporan tersebut berisi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), laporan Administrasi serta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).

Dalam melaksanakan program alokasi dana desa, pasti tidak akan jauh dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat alokasi dana desa. Telah diketahui dari penulis mengenai faktor-faktor tersebut bahwa hanya sedikit yang merasakan faktor penghambat dengan adanya program alokasi dana desa ini. Baik itu Kepala Desa dan perangkatnya, serta masyarakatnya menerima program tersebut dengan baik demi kepentingan bersama dan manfaat yang baik untuk kedepannya bagi masyarakat Sakhuda Bayu.

Komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan para pegawainya berjalan dengan sangat efektif dan berjalan dengan lancar dalam proses penerimaan dan penyampaian ulang untuk masyarakatnya. Pemimpin dengan

anggotanya mampu bekerja sama dengan baik demi kepentingan bersama dan demi kepentingan masyarakat. Para pegawai juga tidak sungkan dalam menyampaikan beberapa pendapat kepada atasannya, pendapat yang diberikan bawahan akan diterima dengan baik oleh Kepala Desa dan didiskusikan bersama dengan jalannya rapat atau musyawarah yang dilakukan.

Jadi, komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat penting untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri. Maka dari itu, penulis di sini menggunakan Teori Informasi Organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan dan multitafsir. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Asumsi dasar teori ini adalah organisasi berada di dalam suatu lingkungan informasi, informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam bentuk tingkat kepastiannya dan organisasi berusaha untuk mengurangi ketidak pastian dalam informasi yang didapatkan.

Jadi pola komunikasi Kepala Desa ini sangat penting. Di mana penulis dapat mengetahui bagaimana proses pengemasan pesan atau informasi yang akan disampaikan ke para pegawai. Pola komunikasi ini bertujuan untuk tidak adanya informasi yang tidak pasti dan kejelasan yang tidak pasti dalam penyampaiannya, karena apapun yang disampaikan adalah demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Organisasi itu sendiri juga harus bisa mengemas pesan atau informasi yang telah disampaikan Kepala Desa secara langsung, sehingga tidak ada terjadinya ketidakpastian akan informasi yang akan diterima masyarakat nantinya. Apabila informasi dapat dikemas dan disampaikan dengan baik, maka semua yang

sudah direncanakan terkait alokasi dana desa ini akan berjalan dengan lancar dan berjalannya sesuai prosedur.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil penelitian dan wawancara maka simpulan dari penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Sakhuda Bayu adalah sebagai berikut :

1. Proses penyampaian informasi yang disampaikan Kepala Desa kepada para pegawai baik itu di kantor maupun melalui Kadus (Kepala Dusun) berjalan dengan baik dan lancar serta efektif. Begitu pun proses penerimaan para pegawai dan Kepala Dusun, mereka dapat menerima pesan tersebut dengan baik.
2. Media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait alokasi dana desa ini disampaikan melalui rapat dan mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat serta lembaga-lembaga di masyarakat untuk membahas mengenai perihal tentang penyampaian terkait alokasi dana desa.
3. Hambatan yang terjadi adalah dalam menyampaikan ulang kepada masyarakat yang tidak cukup sekali. Di sini para pegawai dituntut untuk menjelaskannya secara perlahan dan jelas agar tidak adanya kekeliruan dalam penerimaan informasi yang didapat.

4. Perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa sudah sangat tepat untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa. Perencanaan sudah tepat dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur.
5. Pengawasan yang dilakukan dalam proses pekerjaan terkait alokasi dana desa dilakukan oleh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di Desa tersebut.
6. Pelaporan atau pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa adalah menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang akan diberikan ke Pemerintah Daerah dan Kabupaten.
7. Faktor pendukung dari masyarakat Desa Sakhuda Bayu sangat diperlukan, maka dari itu berjalan sudah program alokasi dana desa di Desa Sakhuda Bayu sejak adanya alokasi dana desa di tahun 2015, berkat dukungan dari masyarakat Desa
8. Keefektifan dalam penyampaian pesan adalah komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dan menghasilkan perubahan dalam sebuah organisasi, sehingga komunikasi bisa diterima dengan jelas dan dapat disampaikan ulang dengan tepat sasaran sesuai apa yang disampaikan dari sumber yang pertama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk Desa Sakhuda Bayu:

1. Demi terciptanya komunikasi yang lebih efektif, maka Kepala Desa dan perangkat desa harus mempertahankan pola komunikasi yang sudah digunakan. Selalu terbuka dalam mengemukakan pendapat agar tidak terjadi kekeliruan atau *misscommunication* dalam penyampaian dan penerimaan pesan yang didapatkan.
2. Lebih meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) agar Desa Sakhuda Bayu menjadi Desa yang lebih maju dan sejahtera dan terus mendukung program yang ke depannya untuk membuat Desa menjadi lebih baik.
3. Bagi penulis selanjutnya agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dan dengan didukung oleh teori yang kuat agar lebih memperbanyak referensi penelitian yang mampu mendukung topik yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyatna, Muhammad dkk. 2011. *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Effendy, Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Peggalian Data Kualitattif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hubeis, Musa dkk. 2012. *Komunikasi Profesional : Perangkat Pengembangan Diri*. Bogor : IPB Press.
- Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, Deddy. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Nasdian, T. Fredian. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ruben, Brent D. 2017. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ruliana, Poppy. 2014. *Komunikasi Organisasi : Teori dan Studi Kasus*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, HAW. 2010. *Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- _____.2010. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- E-Book Buku Saku Dana Desa* oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Abu Rahum. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Kalimantan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POLitik Universitas Mulawarman.
- Andi Siti Sri Hutami. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie.2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Masiyah Kholmi. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Devi Sari Rizky. 2017. *Peran Komunikasi Interpersonal Kepala desa dalam Meningkatkan Komunikasi Kerja Perangkat Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*. Medan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Utara.

Nur Rahmadhani Syam. 2017. *Pola Komunikasi Pengguna Sosial Media Path di SMA Harapan Mandiri Medan*. Medan : fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POLitik Universittas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/27/seperti-apa-pembagian-alokasi-dana-desa-yang-sebenarnya> diakses pada 04 Desember 2018

<https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/> diakses pada 21 Desember 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa diakses pada 11 Desember 2018

<http://repository.umsu.ac.id>. Di akses 23 November 2018. 13.15

Hasil Wawancara Kepala Desa

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Nama Peneliti : Adinda Gita Lestari

Prodi/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Informan : Suyatno

Waktu Wawancara : 21 Februari 2019`

1. Identitas Informan

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Agama : Islam
- c. Usia : 57
- d. Jabatan : Kepala Desa

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara Bapak dalam menyampaikan informasi kepada pegawai dan masyarakat mengenai alokasi dana desa? Apakah secara langsung atau melalui tahapan?

Jb: Melalui tahapan, tentunya yang pertama dengan pegawai terlebih dahulu, baik itu di kantor maupun melalui Kepala Dusun. Tentunya rapat kecil dengan perangkat-perangkat supaya informasi ini bisa sampai ke masyarakat.

2. Media apa yang biasanya digunakan untuk penyebaran informasi secara menyeluruh kepada pegawai?

Jb: media yang saya gunakan dalam penyampaian ini ya melalui rapat dengan mengumpulkan seluruh perangkat desa.

3. Dalam menyampaikan informasi tentang alokasi dana desa, adakah hambatan yang terjadi dalam penyampaiannya?

Jb: Ya kalau hambatan ada, hambatan itu pasti selalu ada dan itu terpulang kembali kepada SDM (Sumber Daya Manusia) manusianya. Penyampaian ini gak akan cukup satu kali, kala memang ada kesulitan mereka pasti akan bertanya.

4. Sebelum melaksanakan alokasi dana desa, perencanaan apa saja yang Bapak lakukan agar pemanfaatan alokasi dana desa berjalan dengan lancar?

Jb: awalnya itu ya musyawarah dusun yang dibuat untuk pelaksanaan RPJM (Pencana Pembangunan Jangka Menengah), yang pertama dilakukan pasti adalah musdus (musyawarah dusun) guna untuk oenyusunan RPJM, setelah dibuat RPJM, kemudian membuat skala prioritas RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Dari tahun ke tahun, missal 2018 apa yang mau dibangun penyusunan RAB selanjutnya.

5. Dalam menjalankan alokasi dana desa tersebut, apakah pelaksanaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Jb: pelaksanaan ya benar. Kalau tidak sesuai prosedur, kami bakal dapat teguran dari pengawas.

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau Kepala Desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa?

Jb: Pengawasan ini dilakukan oleh Kadus (Kepala Dusun), masyarakat juga langsung mengawasi pekerjaan itu, karena pekerjaan ini namanya swakelola, ini semua melibatkan masyarakat, karena dana desa dikerjakan sesuai dengan swakelola. Artinya masyarakat yang kurang mampu ikut melaksanakannya, sesuai petunjuk, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka yang tidak memiliki lapangan kerja dan kemudian tidak punya *skill* inilah saatnya memberikan lapangan pekerjaan dan manfaatnya mereka punya *skill* untuk merubah hidupnya.

7. Pertanggung jawaban seperti apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pemanfaatan alokasi dana desa?

Jb: Pelaporannya itu Administrasi (Adm), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kemudian di lapangan fisik sesuai dengan *job desk* yang ada.

8. Dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pemanfaatan alokasi dana desa?

9. Jb: Kalau faktor hambatan yang pasti SDM (Sumber Daya Manusia), karna rata-rata SDM itu ya lebih banyak SDMnya jauh dari yang diharapkan. Kalau dari masyarakat tidak ada acara tidak mendukung, yang kita kerjakan ini untuk

masyarakat desa sesuai sarana dan prasarana, bagaimana ekonomi mau mencapai titik sasaran jika tidak mau mendukung.

10. Apakah pola komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah desa atau Kepala Desa sudah efektif dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa tersebut kepada pegawai?

Jb: Insya' Allah sudah efektif, karena kalau tidak efektif bagaimana pegawai saya itu mau menyampaikan kepada masyarakat? Karna masyarakat luas ini perlu penjelasan yang jelas dan akurat serta memang bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil Wawancara Kaur Ekbang

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Nama Peneliti : Adinda Gita Lestari

Prodi/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Informan : Ruswadi

Waktu Wawancara : 20 Februari 2019

1. Identitas Informan

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Agama : Islam
- c. Usia : 41 tahun
- d. Jabatan : Kepala Urusan Ekonomi & Bangunan

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak dapat menerima informasi mengenai alokasi dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa?

Jb: Ya, saya dapat menerima informasi yang disampaikan Kepala Desa, melalui media secara lisan atau secara langsung.

2. Dari media apa Bapak menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?

Jb: Biasanya ya dilakukan dari media sosial seperti *WhatsApp* dan langsung disampaikan untuk pemberitahuan bahwa akan diadakannya rapat dan di situ barulah semua disebutkan informasi apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa.

3. Adakah hambatan dalam menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?

Jb: Kalau sampai saat ini hambatan pasti selalu ada, mungkin ada kendala informasi yang kurang dimengerti oleh kami sebagai bawahan dari Kepala Desa dan mungkin dari masyarakat yang kurang memahami bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat-masyarakat awam jadi di saat musyawarah dan disampaikan dengan jelas oleh Bapak Kepala Desa.

Biasanya juga kalau dirapat untuk ADD kami selalu mengundang beberapa perwakilan seperti LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori), maujana, tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ibu PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa dan lain-lain.

4. Menurut Bapak, apakah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat?

Jb: Ya, kami di desa ini melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada pemerintah daerah dan kabupaten.

5. Bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana tersebut?

Jb: sampai dengan saat ini pelaksanaannya tidak ada kendala, karena kita sesuai dengan peraturan daerah dan Undang-undang dan peraturan Kabupaten yang telah ditetapkan.

6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, apakah pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pegawai sudah sangat tepat?

Jb: Kalau masalah pengawasan ya, kami slalu mengadakan pengawasan kepada pekerjaan atau pelaksanaannya, di sini yang mengikuti pengawasan itu ada lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) atau Maujana.

7. Bentuk pertanggung jawaban atau pelaporan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa?

Jb: Kalau pertanggungjawaban kami selalu membuat pelaporan secara tertulis dan diberikan langsung kepda Kepala Desa.

8. Bagaimana respon yang diberikan masyarakat mengenai alokasi dana desa? Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyampaian hal tersebut?

Jb: sampai dengan saat ini tidak ada hambatan karena apa yang dikerjakan kami slalu membuat papan transparansi atau papan pengumuman saat melakukan pekerjaan.

9. Apakah komunikasi yang terjadi antara pegawai dengan Kepala Desa sudah efektif dan berjalan dengan lancar dalam menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa?

Jb: Sebenarnya kalau dibilang efektif ya efektif, dibilang tidak ya tidak. Efektif ini karna kebanyaka masyarakat dan kami sebagai perangkat desa ini masih banyak peraturan-peraturan yang belum kami pahami, tapi dalam penyampaian informasi selalu kami terima dengan baik.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Nama Peneliti : Adinda Gita Lestari

Prodi/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Informan : Romi Sugianto

Waktu Wawancara : 21 Februari 2019

1. Identitas Informan

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Agama : Islam
- c. Usia : 51
- d. Jabatan : Sekretaris Desa

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak dapat menerima informasi mengenai alokasi dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa?

Jb: Ya, dapat. Kebetulan saya di sini sebagai Sekdes memiliki jabatan untuk ADD itu sebagai Tim Pembuat Komitmen (TPK). Tugas TPK itu adalah apabila dana desa itu turun, apabila untuk pembelanjaan barang-barang yang

mau untuk dilaksanakan pembangunan desa, tugas saya ya memverifikasi perihal tersebut.

2. Dari media apa Bapak menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?

Jb: Untuk sosialisasi ya? Mediana adalah rapat. Masyarakat juga ikut di[lilih, nanti ada musdus (musyawarah dusun kemudian dilanjutkan dengan musrembang (musyawarah rembuk bangunan dana pa-apa saja yang diajukan desa ke Pemerintah Kabuoaten.

3. Adakah hambatan dalam menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?

Jb: Tidak ada, karena memang ADD ini sudah diprogramkan.

4. Menurut Bapak, apakah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat?

Jb: Tepat.

5. Bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana tersebut?

Jb: kalau pemanfaatan ADD kan diturunkan ke desa, nanti tergantung dia di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Apa-apa saja yang diusulkan bagunan itu. Contohnya paret pasangan, rapat beton, dan pembenahan. Sesuai [rosedur pelaksanaannya. Kalau untuk ADD ini kan banyak ADD ini dibuat kegiatannya untuk BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagori), di situ memang ada pemberdayaan. Contohnya kita dibantu dari

pemerintah kelautan dengan memberikan Mesin Pelet, itulah yang kita butuhkan salah satunya untuk pemberdayaan.

6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, apakah pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pegawai sudah tepat?

Jb: Sudah. Conth pengawasan di sini dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)

7. Bentuk pertanggung jawaban atau pelaporan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa?

Jb: RAB (Rencana Anggaran Pembangunan) dulu, baru LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)

8. Bagaimana respon yang diberikan masyarakat mengenai alokasi dana desa? Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyampaian hal tersebut?

Jb: masyarakat Sakhuda Bayu tentang ADD ini sudah sangat senang, karena di depan rumahnya sidah ada kita bangun rapat beton, paret pasangan. Kalau untuk masyarakat Sakhuda Bayu dengan adanya ADD ini tidak ada hambatan sedikitpun.

9. Apakah komunikasi yang terjadi antara pegawai dengan Kepala Desa sudah efektif dan berjalan dengan lancar dalam menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa?

Jb: Kalau untuk penyampaiannya sudah tepat, sudah sangat efektif. Bisa kita lihat dari semua yang sudah dibuat.

Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Nama Peneliti : Adinda Gita Lestari

Prodi/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Informan : Sutikno

Waktu Wawancara : 21 Februari 2019

1. Identitas Informan

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Agama : Islam
- c. Usia : 51 tahun
- d. Jabatan : Kepala Dusun Huta I Atas

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak dapat menerima informasi mengenai alokasi dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa?

Jb: Ya, dengan adanya informasi yang diberikan kepada kami, kami dapat mempermudah menerima informasi alokasi dana desa dengan cepat.

2. Dari media apa Bapak menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?

Jb: Ya dengan adanya media sosial ini kita lebih mudah. Contohnya, dari *WhatsApp*, SMS ya justru lebih cepat. Isinya itu sudah pasti tujuannya untuk kami mengikuti rapat.

3. Adakah hambatan dalam menerima informasi mengenai alokasi dana desa tersebut?

Jb: Ya da, namanya hambatan itu pasti selalu ada. Contohnya, kadang-kadang kita menyampaikan kepada masyarakat awam ini tidak segampang kita yang sudah diberitahu oleh Kepala Desa.

4. Menurut Bapak, apakah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat?

Jb: Sudah tepat, Bu. Karna itu untuk saing dipergunakan, misalnya untuk ke lahan pertanian, jadi memprmudah warga untuk mengutip hasil dari pertaniannya itu.

5. Bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana tersebut?

Jb: Menurut saya sudah tepat, karena sasarannya untuk masyarakat agar tepat guna. Contohnya, untuk infrastruktur itu untuk ke pertanian dan untuk desa yang lebih dalam.

6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa, apakah pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pegawai sudah tepat?

Jb: Sangat tepat. Karena begini, Bu. Pegawasan dari desa sudah cukup dengan adanya lembaga yang kita miliki. Contoh Maujana dan LPMN.

7. Bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa?

Jb: Laporan tertulis yang dipaorkan ke Pemerintah Kabupaten, melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

8. Bagaimana respon yang diberikan masyarakat mengenai alokasi dana desa? Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyampaian hal tersebut?

Jb: Tentu ada, ada beberapa masyarakat yang menerima. Dan ada juga yang menghambat. Contohnya seolah-olah tanah mereka dikurangi untuk perbesaran jalan. Tapi kan, gunanya untuk manfaat ke depan lebih besar.

9. Apakah komunikasi yang terjadi antara pegawai dengan Kepala Desa sudah efektif dan berjalan dengan lancar dalam menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa?

Jb: Insya' Allah kami sejalan dengan Kepala Desa. Karena dengan kerja sama antara Kepala Dusun dengan Kepala Desa mudah-mudahan dengan informasi yang terkait masyarakat berjalan dengan lancar dan efektif.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
10r dan langganinya

041.11

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 November 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Adinda Gita Lestari
N P M : 1503110232
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 150 sks, IP Kumulatif 3.66

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. (Kabupaten Simalungun)	√ 24/11-2018
2	Media Relations Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Simalungun dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Wisata Bukit Indah Simarjarunjung.	
3	Implementasi Komunikasi Kelompok dalam Pengembangan Pariwisata Pemandian Alam Bah Damanik Simalungun.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Pemohon,

(Adinda Gita Lestari)

PB: ELVITA YEN/NI



Scanned with
CamScanner

Ketua,



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 11.041/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal : **21 November 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ADINDA GITA LESTARI**
N P M : 1503110232
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SIMALUNGUN**
Pembimbing : **ELVITA YENNI, S.S., M.Hum.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
4. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 21 November 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 13 Rabiul Awwal 1440 H
21 November 2018 M

Dekan



Dr. Arifin Satch, S.Sos., MSP.

Tembusan :

4. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
5. Pembimbing ybs. di Medan;
6. Peringgal.



Scanned with CamScanner

Medan, 16 Januari 2019

SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Gita Lestari

Npm : 1503110232

Kelas : 7 B Humas Sore

Dengan ini saya mengajukan penggantian judul skripsi.

Judul Lama : **“Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”**

Judul Baru : **“Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”**

Saya yang mengajukan permohonan
penggantian judul skripsi



Adinda Gita Lestari

Diketahui Oleh

Pembimbing

Program Studi Ilmu Komunikasi

FISIP UMSU



Elvita Yenni, S.S., M.Hum
NIDN: 0131038201

Diketahui Oleh

Ketua

Program Studi Ilmu Komunikasi

FISIP UMSU



Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom
NIDN: 0110077602





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 11.041/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal : **21 November 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ADINDA GITA LESTARI**
N P M : 1503110232
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA**

Pembimbing : **ELVITA YENNI, S.S., M.Hum.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 21 November 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 10 Jumadil Awal 1440 H
16 Januari 2019 M

Dekan



Dr. Aguin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal



Scanned with
CamScanner



Enggah Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 28 Desember 2018.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADINDA GITA LESTARI
N P M : 1903 110232
Jurusan : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 11.041./SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal

dengan judul sebagai berikut :
Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Elvita Jenni, SS., M. Hum)

Pemohon,

(Signature)

(Adinda Gita Lestari)



Scanned with
CamScanner

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 011/JUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Selasa, 08 Januari 2019
 Waktu : 14.00 s.d. Selesai
 Tempat : Ruang 207-C FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom

NO	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PELILIH	PEMIMPIN	JUDUL SKRIPSI
6	ILMA WATY	1503110204	MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom. ✓	MANAGEMENT KRISIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM
7	ADINDA GITA LESTARI	1503110232	ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.	ELVITA YENNI, S.S., M.Hum. ✓	KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SIMALUNGUN
8	ABDURRAHMAN ZUHDI	1503110267	ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.	LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom. ✓	IMPLEMENTASI KOMUNIKASI ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYALURAN ZAKAT
9	MUHAMMAD RIDWAN MANURUNG	1503110284	ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.	TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom., H. ✓	STRATEGI KOMUNIKASI VISUAL PIZZA TURKI MEDAN MELALUI VIDEO INSTAGRAM (Studi pada Fide Arne)
10	MEISY TRIANA DEWI	1503110100	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. ✓	IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. PERTAMINA MARKETING OPERATION REGIONAL 1 DALAM UPAYA MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN

Medan, 28 Rabiul Akhir 1440 H
05 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Zhggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id


Sk-5


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama lengkap : ADINDA GITA LESTARI
N P M : 1503110232
Jurusan : Ilmu Komunikasi / HUMAS
Judul Skripsi : Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pembedayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20/11/2018	Bimbingan Judul Skripsi dan Tujuan Penelitian	Zf
2.	26/11/2018	Bimbingan Proposal Skripsi dan Revisi Proposal Skripsi.	Zf
3.	27/11/2018	ACC proposal skripsi	Zf
4.	11/01/2019	Bimbingan BAB I - III skripsi	Zf
5.	16/01/2019	Revisi BAB I - III skripsi	Zf
6.	12/02/2019	ACC BAB I - III, Bimbingan Pedoman Wawancara	Zf
7.	02/03/2019	Bimbingan BAB IV	Zf
8.	03/03/2019	ACC- BAB II dan Bimbingan BAB VI	Zf
9.	05/05/2019	ACC BAB V dan ACC skripsi	Zf

Medan, 08 Maret2019....

Dekan,

(Dr. Arifin Shaleh, S.Sos., M.P)

Ketua Program Studi,

(Nurhasanah Navision, S.Sos., M.I.kom)

Pembimbing ke : ...

(EVITA YENNI, S., M., Hum.)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 383/UND/II.3-AU/UMSU-03/IF/2019

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
26	LULUK KURNIA	1503110186	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	Dr. ANANG ANAS AZHAR, MA	Dra. Hj. ASMAWITA, AM, MA	POLA KOMUNIKASI KESEHATAN DALAM MENANGANI GIZI BURUK DI PUSKESMAS MARTUBUNG
27	ADINDA GITA LESTARI	1503110232	Dra. Hj. ASMAWITA, AM, MA	CORRY NOVIRICA SINAGA, S.Sos., M.A.	ELVITA YENNI, S.S. M.Hum	POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA
28	NOVIA RAHMAH	1503110024	RAHMANITA GINTING, HJ, Ph.D	TENERMAN, S.Sos, M.I.Kom	LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom	VIDEOGRAM SEBAGAI MEDIA LIFESTYLE HEDONISME PADA MASYARAKAT GILUGUR DARAT II MEDAN
29	ANGGI CHAIRIAH	1503110118	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	ASPEK EDUKASI DALAM TAYANGAN SERIAL KARTUN TAYO THE LITTLE BUS DIRTY (STUDI SEMIOTIKA DALAM FILM TAYO THE LITTLE BUS)
30	NUR'AFFAH	1503110193	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	ELVITA YENNI, S.S. M.Hum	Dra. Hj. ASMAWITA, AM, MA	OPINI MASYARAKAT TENTANG PERISTIMA JATUHNYA LIONAIR JT - 610 DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 04 Rajab 1440 H
 11 Maret 2019 M



Ditetapkan oleh :
 Dr. MUSALEH AD ARIFIN, SH, M.Hum

Scanned with
 CamScanner

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 243/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Jumadil Akhir 1440 H
12 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Sahkuda Bayu**
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ADINDA GITA LESTARI**
N P M : 1503110232
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **POLA KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.





PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN GUNUNG MALELA
NAGORI SAHKUDA BAYU
Jln. ASAHAN KM . 22 - PASAR TENGAH Kode Pos 21153

Sahkuda Bayu, 27 Februari 2019

Nomor : 140/ 075 /12.08.02.2015/2019
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah SUMATERA UTARA
Jl.Mucthar Basri No. 3 Medan
Di-

Tempat

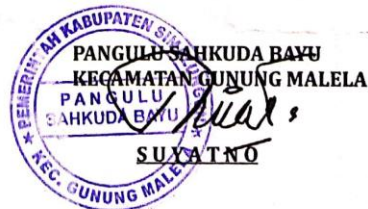
Sehubungan dengan Surat saudara Nomor . 243/KET/II.3-AU/UMSU-03/2019 Tanggal 12 Februari 2019 Hal : **Permohonan Izin Penelitian atas:**

N a m a	:	ADINDA GITA LESTARI
N P M	:	1503110232
Program Studi	:	Ilmu Komunikasi
Smester	:	VII (Tujuh) Tahun 2018/2019
Judul Skripsi	:	POLA KOMUNIKASI PANGULU DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA

Dengan ini **KANTOR PANGULU** Nagori Sahkuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk magang / Penyebaran kuisisioner / Penelitian dan /atau Riset pada **KANTOR PANGULU** Nagori Sahkuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun .

Setelah selesai melaksanakan Riset/Penelitian, Mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan Satu Soft copy hasil Riset/Penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami .

Demikian Penyebaran kuisisioner / Penelitian dan /atau Riset , agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Tembusan :
1. Pertingal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ADINDA GITA LESTARI**

Tempat / Tgl. Lahir : Sakhuda Bayu, 09 Juni 1996

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : HUTA III SAHKUDA BAYU

Ayah : Suyatno

Ibu : Almh. Sri Wardhani

Pendidikan :

1. Tahun 2002-2008 SD NEGERI 091274 Sakhuda
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun
3. Tahun 2011-2014 SMA Swasta Plus Shafiyatul Amaliyyah Medan.
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab

Medan, Maret 2019

ADINDA GITA LESTARI